

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Antut Rika Hidayati^{1*}, Deby Febriyan Eprilianto², Muhammad Farid Ma'ruf³, Galih Wahyu Pradana⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

24040674388@mhs.unesa.ac.id, debyepriyanto@unesa.ac.id, galihpradana@unesa.ac.id, muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sistem terintegrasi yang didorong penggunaannya oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya transformasi digital mereka. Sistem ini membantu perencanaan, penganggaran, administrasi, dan pelaporan pemerintah. Salah satu instansi yang telah mengadopsi SIPD untuk meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan adalah Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Keterbatasan kompetensi personel, kebutuhan untuk bereaksi terhadap perubahan sistem, dan keterbatasan teknis yang berdampak pada kelancaran operasional masih menjadi beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan model DeLone dan McLean untuk keberhasilan sistem informasi pada kasus SIPD di Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan berbasis metodologi studi kasus. Kami menggunakan pendekatan analitis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña untuk menyaring data yang dikumpulkan dari staf yang berpartisipasi dalam pengelolaan SIPD, yang meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Kemudian, kami menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Pengadopsian SIPD telah membantu menyederhanakan prosedur administrasi, meningkatkan akurasi data, mempersingkat waktu penyelesaian, dan meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Keterbatasan sumber daya manusia, ketergantungan pada operator sistem, dan masalah teknis aplikasi telah menghambat optimalisasi penuh efektivitas implementasi. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa persiapan organisasi, kompetensi peralatan, dan dukungan kelembagaan untuk transformasi digital pemerintah lebih penting daripada kualitas sistem informasi dalam menentukan efektivitas implementasi SIPD.

Kata Kunci: Efektivitas, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, SIPD, *E-government*, Administrasi Publik.

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang lebih baik, lebih efisien, terbuka, dan akuntabel adalah hasil dari pergeseran paradigma dalam administrasi pemerintahan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (2022) menyatakan bahwa digitalisasi dapat dilihat sebagai alat administratif dan strategi untuk meningkatkan daya tanggap dan kualitas layanan publik. Perubahan ini dimungkinkan oleh e-government, yang merupakan singkatan dari "pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi," yang berarti menggunakan TI untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mencapai tata kelola yang baik (Indrajit, 2006). Persiapan organisasi, kompetensi sumber daya manusia, keterampilan manajemen perubahan, dan kemampuan teknologi sangat penting untuk keberhasilan penerapannya (Heeks, 2006). Pemerintahan yang lebih efisien dan berbasis data didukung oleh pengembangan sistem informasi terintegrasi yang sedang dilakukan pemerintah, sesuai dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu produk dari pelaksanaan kebijakan ini, yang dibangun sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD. Sistem SIPD menyatukan berbagai aspek administrasi pemerintah daerah ke dalam satu platform terpadu, termasuk perencanaan pembangunan, penganggaran, administrasi, pelaporan, dan evaluasi. Dengan tujuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan, memperkuat kerja sama antar instansi daerah, dan memungkinkan administrasi pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan, integrasi ini berupaya menghasilkan data yang akurat, terkini, dan konsisten. Pemerintah daerah dapat

menyederhanakan operasi administrasi, mengurangi duplikasi data, dan meningkatkan manajemen informasi pemerintah dengan menggunakan sistem terpadu.

Inisiatif reformasi birokrasi bertujuan untuk menyediakan pemerintahan yang menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, dan implementasi SIPD berfokus pada digitalisasi administrasi dan merupakan bagian dari upaya tersebut. Meskipun kecanggihan teknologi tentu merupakan faktor penting, faktor lain seperti kesiapan organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kemampuan adaptasi pejabat terhadap perubahan sistem kerja juga berperan dalam menentukan keberhasilan implementasi sistem informasi (DeLone & McLean, 2003). Oleh karena itu, untuk memenuhi tujuan implementasi sistem secara maksimal, penting untuk secara teratur menganalisis efektivitas implementasi SIPD.

Pembentukan SIPD diharapkan dapat meningkatkan integrasi data antar lembaga, mempercepat proses administrasi, dan memperkuat akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan daerah sebagai bagian dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, upaya-upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat transformasi digital sektor publik.

Di antara instansi pemerintah daerah yang telah menggunakan SIPD untuk memperkuat manajemen pemerintahan adalah Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Beberapa tugas administratif bergantung pada sistem ini, termasuk administrasi keuangan, perencanaan aktivitas, manajemen anggaran, dan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Kemampuan untuk mengintegrasikan data dan mempercepat penyelesaian tugas adalah dua alasan mengapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi administratif telah terpengaruh secara positif oleh implementasi SIPD. Meskipun demikian, masih ada sejumlah tantangan yang harus diatasi selama penerapan sistem. Ini termasuk kurangnya staf yang kompeten, ketergantungan pada operator SIPD, dan masalah teknis yang menghambat kelancaran operasi administratif. Bukti seperti ini menunjukkan bahwa kesiapan pengguna dan dukungan organisasi untuk mengelola transisi ke tata kelola berbasis digital sama pentingnya dengan kualitas sistem informasi dalam hal keberhasilan implementasi SIPD.

Efisiensi administrasi dan kualitas manajemen data pemerintah daerah dapat ditingkatkan dengan menggunakan SIPD, menurut berbagai penelitian. Namun, sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada organisasi pemerintah daerah seperti Bappeda dan BPKAD, yang masing-masing bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan aset. Meskipun kecamatan berbeda dari lembaga daerah lainnya dalam karakteristik organisasi, kapasitas sumber daya manusia, dan kompleksitas administrasi, saat ini masih kurang penelitian yang secara khusus mengkaji efisiensi implementasi SIPD di tingkat kecamatan. Kesenjangan pengetahuan ini menyoroti perlunya studi tambahan yang ditargetkan untuk menentukan efektivitas dan faktor penentu implementasi SIPD di tingkat kecamatan.

Untuk menilai seberapa baik SIPD telah berfungsi, penelitian ini mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Model Keberhasilan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003). Berdasarkan empat kriteria—kualitas sistem, kualitas informasi, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih—model ini menentukan apakah instalasi sistem informasi berhasil. Alasan di balik pemilihan keempat metrik ini adalah kemampuannya untuk memberikan gambaran holistik tentang manfaat teknis dan manfaat yang dirasakan pengguna dari penerapan SIPD dalam memfasilitasi administrasi pemerintahan.

Gagasan tentang sistem informasi yang efektif telah berubah sejak DeLone dan McLean pertama kali mengusulkannya (1992). Kerangka analitis yang diperluas untuk menilai efektivitas penerapan sistem informasi di berbagai organisasi termasuk lembaga sektor publik diperkenalkan pada tahun 2003 dengan penambahan dimensi kualitas layanan dan manfaat bersih pada model ini.

Studi ini bermaksud untuk menggunakan definisi ini sebagai dasar untuk memeriksa seberapa baik Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) diimplementasikan di Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Selain membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas implementasi SIPD dan mencapai tata kelola yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan studi administrasi publik, khususnya di bidang pemerintahan digital.

METODE

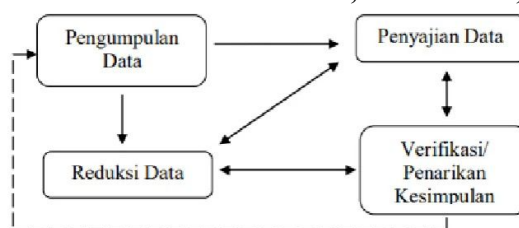
Untuk mengevaluasi efektivitas instalasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan metode studi kasus. Peneliti memilih teknik kualitatif karena memberikan wawasan tentang fenomena sosial melalui kata-kata dan pengalaman partisipan sendiri (Creswell & Creswell, 2018). Teknik studi kasus dipilih karena memungkinkan pemeriksaan menyeluruh terhadap suatu fenomena dalam lingkungan dunia nyata, yang selaras dengan karakteristik lokasi penelitian (Yin, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan semua elemen yang memengaruhi efektivitas implementasi SIPD dengan menggunakan pendekatan ini.

Observasi partisipan, wawancara mendalam, dan catatan tertulis merupakan sebagian besar dari kumpulan data. Semua informan diminta untuk mengisi wawancara semi-terstruktur tentang pengalaman mereka dengan SIPD, keuntungan yang mereka lihat, dan kesulitan yang mereka hadapi saat mengimplementasikan sistem tersebut. Untuk mendukung data penelitian, dilakukan peninjauan terhadap dokumen administrasi, peraturan, dan arsip yang berkaitan dengan implementasi SIPD, sementara observasi terhadap kegiatan administrasi dan penggunaan SIPD di Kabupaten Parang dilakukan.

Penggunaan metode triangulasi sumber dan teknis memastikan bahwa data tetap valid. Dalam triangulasi sumber, perspektif banyak informan dipertimbangkan, sedangkan dalam triangulasi teknis, temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dibandingkan dan dikontraskan. Untuk memberikan justifikasi ilmiah bagi temuan penelitian, triangulasi digunakan untuk memperkuat keandalan data.

Informasi tersebut dianalisis dengan menggunakan metodologi analisis interaktif yang diusulkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dari saat data dikumpulkan hingga penelitian selesai, analisis dilakukan untuk menemukan pola dan menghasilkan temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Gambar 1. Model Analisis Data Miles, Huberman, dan Saldana



Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014), diadaptasi oleh peneliti.

Studi ini mengambil Model Keberhasilan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003) dan menerapkannya pada analisis efektivitas implementasi SIPD. Empat kriteria utama yang digunakan untuk melakukan evaluasi adalah manfaat bersih, kepuasan pengguna, kualitas informasi, dan kualitas sistem. Evaluasi kontribusi SIPD terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan di Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan dilakukan dalam empat aspek tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Parang di Kabupaten Magetan menjadi target terbaru upaya digitalisasi pemerintah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan daerah melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Perencanaan program, penganggaran, administrasi keuangan, dan pelaporan kegiatan hanyalah beberapa tugas administratif yang memanfaatkan sistem ini. Prosedur administrasi yang lebih efisien, data berkualitas tinggi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat adalah beberapa hal yang diharapkan dari penggunaan SIPD.

Model Keberhasilan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003), yang mencakup empat dimensi utama kualitas sistem, kualitas informasi, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SIPD dalam penelitian ini. Keempat dimensi tersebut dipilih karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan implementasi sistem informasi, baik dari aspek teknis maupun manfaat yang dirasakan oleh pengguna dalam mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan.

a. Kualitas Sistem (*System Quality*)

Kualitas sistem merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan SIPD dalam mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan melalui kemudahan penggunaan, keandalan sistem, kecepatan akses, serta integrasi berbagai proses administrasi. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SIPD di Kecamatan Parang telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap mekanisme kerja aparatur. Sebelum SIPD diterapkan, proses administrasi masih dilakukan melalui beberapa aplikasi yang berbeda sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam pengelolaan data dan penyusunan laporan. Setelah SIPD diimplementasikan, seluruh proses administratif dapat dilakukan melalui satu sistem terpadu, sehingga alur kerja menjadi lebih sistematis.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa SIPD mempermudah pelaksanaan pekerjaan melalui integrasi data perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dalam satu sistem. Kondisi tersebut memudahkan aparatur dalam mengelola data dan menyusun laporan secara lebih efisien, sehingga kualitas sistem berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas administrasi di Kecamatan Parang.

Meskipun demikian, penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kualitas sistem tersebut masih jauh dari ideal. Beberapa informan mengungkapkan bahwa aplikasi SIPD masih mengalami gangguan teknis, terutama ketika mendekati batas waktu penyampaian laporan atau pada saat terjadi pembaruan sistem oleh pemerintah pusat. Gangguan tersebut menyebabkan proses penyimpanan data menjadi lebih lambat, bahkan pada kondisi tertentu pengguna harus mengulang proses input data. Selain itu, perubahan tampilan maupun fitur aplikasi mengharuskan aparatur kembali menyesuaikan diri sehingga membutuhkan waktu adaptasi.

Berdasarkan hasil ini, bukan hanya jumlah fitur yang penting dalam mengevaluasi kualitas suatu sistem; kesederhanaan, stabilitas, dan keandalan lebih penting. Kualitas sistem didefinisikan oleh DeLone dan McLean (2003) sebagai jumlah dari hal-hal berikut: kegunaan, aksesibilitas, adaptabilitas, keandalan, dan kapasitas sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Sistem yang andal dapat meningkatkan efisiensi dan kepercayaan pengguna, menurut Jogiyanto (2007). Metrik ini menunjukkan bahwa SIPD Distrik Parang telah mencapai kualitas sistem yang baik secara keseluruhan, kecuali stabilitas dan keandalan aplikasi, yang mungkin bisa lebih baik.

Septiani dan Isnawaty (2024) menemukan bahwa sistem informasi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi administrasi dengan mengintegrasikan data dan menyederhanakan proses kerja; temuan penelitian kami sesuai dengan temuan mereka. Namun, penelitian tersebut mencatat bahwa kesiapan infrastruktur teknis merupakan faktor utama dalam keberhasilan atau kegagalan instalasi sistem informasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Damayanti dan Tukiman (2025), yang

menemukan bahwa keterbatasan teknis dalam SIPD terus berdampak pada keberhasilan implementasi di berbagai kotamadya.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dipahami bahwa kualitas sistem SIPD di Kecamatan Parang telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efektivitas administrasi pemerintahan. Integrasi proses administrasi dalam satu sistem mampu mempercepat pelaksanaan pekerjaan serta mengurangi potensi kesalahan dalam pengelolaan data. Namun demikian, peningkatan kualitas infrastruktur teknologi dan penyempurnaan sistem tetap diperlukan agar implementasi SIPD dapat berjalan secara lebih stabil dan berkelanjutan.

Analisis Kritis

Studi ini menunjukkan bahwa pengalaman pengguna sama pentingnya dengan faktor teknis sistem dalam menentukan efektivitas implementasi SIPD, berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada pengalaman pengguna. Hasilnya tidak akan optimal terlepas dari seberapa baik sistem tersebut terintegrasi jika peralatan tidak cukup terampil untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. Dengan demikian, interaksi antara kompetensi teknologi, kesiapan organisasi, dan kompetensi sumber daya manusia menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi SIPD. Temuan ini memperkuat argumen yang dikemukakan oleh DeLone dan McLean (2003), yang berpendapat bahwa kualitas sistem bukanlah satu-satunya metrik yang penting dalam mengevaluasi kinerja sistem informasi; pengalaman aktual pengguna dengan manfaat sistem setelah digunakan dalam operasi organisasi sama pentingnya.

b. Kualitas Informasi (*Information Quality*)

Komponen penting dari sistem informasi yang efektif adalah data berkualitas tinggi. Implementasi administrasi pemerintah dan pengambilan keputusan dibantu oleh informasi yang akurat, relevan, komprehensif, mudah dipahami, dan diberikan tepat waktu. Efektivitas prosedur administrasi dan ketepatan keputusan keduanya ditingkatkan oleh informasi berkualitas tinggi, kata Laudon dan Laudon (2022).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas data yang digunakan pemerintah telah meningkat sejak SIPD diimplementasikan di Kabupaten Parang. Sebelum SIPD diterapkan, proses pengelolaan data masih dilakukan melalui beberapa aplikasi yang berdiri sendiri sehingga sering ditemukan perbedaan data antarbagian. Kondisi tersebut menyebabkan aparatur harus melakukan pengecekan ulang untuk memastikan kesesuaian data sebelum digunakan dalam penyusunan dokumen administrasi. Setelah seluruh proses diintegrasikan melalui SIPD, data menjadi lebih terpusat sehingga konsistensi informasi antarbidang dapat lebih terjaga.

Berdasarkan hasil wawancara, para informan menyatakan bahwa informasi yang dihasilkan SIPD telah membantu mempercepat penyusunan dokumen administrasi karena data yang digunakan berasal dari satu basis data yang sama. Integrasi tersebut mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan informasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Selain itu, sistem ini memfasilitasi pembaruan data, memungkinkan para pejabat untuk mengakses informasi yang lebih terkini yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas informasi yang dihasilkan SIPD berkontribusi terhadap peningkatan ketelitian aparatur dalam menyusun dokumen administrasi. Sistem menyediakan format data yang lebih terstandar sehingga mengurangi potensi kesalahan dalam proses input maupun pengolahan informasi. Standarisasi tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas dokumen administrasi, tetapi juga mempermudah proses verifikasi oleh instansi yang berwenang.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kualitas informasi masih dipengaruhi oleh perubahan kebijakan dan pembaruan sistem yang dilakukan secara berkala. Ketika terdapat perubahan

regulasi dari pemerintah pusat, aparaturnya harus melakukan penyesuaian terhadap format maupun mekanisme pengisian data pada SIPD. Proses adaptasi tersebut memerlukan waktu dan berpotensi menimbulkan kesalahan apabila pengguna belum memahami perubahan yang diterapkan. Oleh karena itu, pembaruan sistem perlu diikuti dengan penyediaan informasi teknis dan pendampingan yang memadai agar kualitas informasi tetap terjaga.

Menurut DeLone dan McLean (2003), kualitas informasi merupakan penentu keberhasilan suatu sistem informasi, karena keputusan yang lebih baik dapat dibuat dengan data yang lebih mutakhir, relevan, akurat, dan komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SIPD telah memenuhi sebagian besar karakteristik tersebut. Informasi yang dihasilkan sistem dinilai mampu mendukung kebutuhan administrasi di Kecamatan Parang, terutama dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Dengan demikian, kualitas informasi yang dihasilkan SIPD menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rezkhaty dan Alam (2024), yang berpendapat bahwa sistem informasi pemerintah yang dibangun di atas platform digital dapat meningkatkan kualitas data dengan mengintegrasikan data di berbagai departemen dan menghilangkan inkonsistensi dan duplikasi. Karena semua operasi administrasi didokumentasikan secara lebih sistematis dengan kualitas informasi yang baik, akuntabilitas dan keterbukaan dalam manajemen pemerintahan akan tumbuh, menurut penelitian Wurara (2024). Konsisten dengan temuan ini, integrasi data merupakan manfaat penting dari penerapan SIPD.

Di sisi lain, hasil di tingkat kecamatan lebih tepat didefinisikan oleh penelitian ini. Kapasitas sistem untuk menghasilkan data yang benar dan aparaturnya untuk memperbarui data secara konsisten dan tepat adalah dua penentu utama kualitas informasi. Dengan kata lain, kualitas informasi merupakan hasil interaksi antara teknologi yang digunakan dan kompetensi pengguna dalam mengelola data administrasi. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai implementasi SIPD, khususnya pada organisasi pemerintahan yang memiliki sumber daya manusia dan kapasitas teknologi yang relatif terbatas.

Di Kabupaten Parang, penyediaan informasi yang lebih akurat, terintegrasi, dan relevan untuk membantu pelaksanaan administrasi pemerintahan telah ditingkatkan dengan penerapan SIPD, sesuai dengan dimensi kualitas informasi. Meskipun masih diperlukan penyesuaian terhadap perubahan regulasi dan pembaruan sistem, manfaat yang dihasilkan menunjukkan bahwa SIPD telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi pemerintahan.

Analisis Kritis

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kualitas informasi menjadi faktor yang memperkuat efektivitas implementasi SIPD. Integrasi data yang dihasilkan sistem mampu mengurangi kesalahan administrasi sekaligus meningkatkan konsistensi informasi antarproses pemerintahan. Namun demikian, kualitas informasi tidak hanya dipengaruhi oleh desain sistem, selain itu, seberapa baik para pejabat menangani perubahan peraturan dan secara konsisten memperbarui data juga penting. Oleh karena itu, menciptakan teknologi sangat penting, tetapi meningkatkan kompetensi pengguna melalui bimbingan dan pelatihan juga sama pentingnya. Dengan demikian, keberhasilan SIPD sebagai sistem informasi pemerintahan tidak hanya terletak pada kemampuannya menghasilkan informasi yang berkualitas, tetapi juga pada kesiapan organisasi dalam memanfaatkan informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.

c. Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*)

Salah satu komponen dari Model Keberhasilan Sistem Informasi yang diusulkan oleh DeLone dan McLean (2003) adalah kepuasan pengguna, yang mengukur seberapa baik sistem informasi memenuhi

persyaratan dan harapan penggunanya. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa sistem mudah digunakan, menghasilkan informasi yang berkualitas, serta mampu mendukung penyelesaian pekerjaan secara efektif. Dengan demikian, kepuasan pengguna menjadi indikator bahwa implementasi sistem telah memberikan manfaat nyata bagi organisasi, sebagaimana juga dikemukakan oleh Hasbah et al. (2025).

Penelitian menunjukkan bahwa aparat Kabupaten Parang menerima SIPD (Sistem Perencanaan Pembangunan Terpadu) ketika pertama kali diperkenalkan. Mayoritas sumber mengatakan bahwa SIPD menyederhanakan manajemen administrasi pemerintahan dengan memusatkan dan mengotomatiskan tugas-tugas termasuk perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, dan pelaporan dilakukan melalui satu sistem yang terintegrasi. Kondisi tersebut mempermudah pengguna dalam mengakses informasi, mempercepat penyelesaian pekerjaan, serta mengurangi penggunaan dokumen secara manual.

Selain memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan, SIPD juga dinilai mampu meningkatkan ketertiban administrasi. Seluruh data tersimpan secara sistematis sehingga memudahkan aparat ketika melakukan pencarian dokumen maupun penyusunan laporan. Informan menyampaikan bahwa keberadaan sistem yang terintegrasi mengurangi risiko kehilangan dokumen dan mempermudah proses koordinasi antarpegawai karena seluruh pengguna mengakses data yang sama. Hal ini membuktikan bahwa SIPD telah meningkatkan pengalaman pengguna dibandingkan mekanisme manajemen lama.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengguna belum sepenuhnya optimal. Beberapa informan mengungkapkan bahwa perubahan fitur dan pembaruan aplikasi yang dilakukan secara berkala menyebabkan pengguna harus kembali mempelajari mekanisme penggunaan sistem. Selain itu, gangguan teknis seperti lambatnya akses sistem atau *server down* pada waktu tertentu turut memengaruhi kenyamanan pengguna dalam menjalankan pekerjaan. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian aparat masih bergantung pada operator SIPD ketika menghadapi kendala teknis maupun perubahan prosedur dalam sistem.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan organisasi dalam menawarkan bantuan kepada pengguna memiliki dampak yang lebih besar terhadap kebahagiaan pengguna dibandingkan dengan kualitas teknologi itu sendiri. Pelatihan, pendampingan, dan penyediaan panduan penggunaan menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan kemampuan aparat dalam memanfaatkan SIPD secara optimal. Dengan demikian, peningkatan kepuasan pengguna memerlukan kombinasi antara pengembangan sistem informasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Kepuasan pengguna merupakan hasil dari sistem dan informasi berkualitas tinggi yang dirasakan saat menggunakannya (DeLone dan McLean, 2003). Pengguna akan lebih puas dengan sistem secara keseluruhan jika data dan sistem itu sendiri berkualitas lebih tinggi. Temuan dari studi yang dilakukan di Kabupaten Parang mendukung hipotesis ini. Kemudahan penggunaan, integrasi data, dan kualitas informasi yang dihasilkan SIPD berkontribusi terhadap meningkatnya kepuasan aparat dalam melaksanakan tugas administrasi. Sebaliknya, kendala teknis dan keterbatasan kompetensi pengguna menjadi faktor yang mengurangi tingkat kepuasan terhadap implementasi sistem. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang menemukan bahwa kebahagiaan pengguna dipengaruhi oleh seberapa baik perusahaan membantu pelanggannya beradaptasi dengan teknologi baru dan seberapa baik layanan sistemnya. Namun demikian, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang lebih terarah dengan menunjukkan bahwa di tingkat kecamatan, interaksi sederhana antar karyawan justru mempercepat proses berbagi pengetahuan tentang penggunaan SIPD. Bantuan secara teratur diberikan kepada rekan kerja yang mengalami kesulitan oleh petugas yang lebih memahami sistem. Salah satu alasan keberhasilan penerapan SIPD meskipun terdapat keterbatasan teknis adalah pola kolaborasi ini.

Meskipun masih ada beberapa area yang perlu ditingkatkan, secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna di Kecamatan Parang merasa puas dengan implementasi SIPD. Kepuasan

pengguna terbentuk karena sistem mampu memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendukung penyediaan informasi yang lebih terintegrasi. Namun demikian, peningkatan kualitas layanan teknis, pelatihan yang berkelanjutan, dan stabilitas sistem menjadi faktor yang perlu diperhatikan agar tingkat kepuasan pengguna dapat terus meningkat.

Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas informasi yang dihasilkan, bantuan sistem dalam menyelesaikan tugas, dan kemudahan pengoperasian sistem semuanya berdampak pada kepuasan pengguna. Pengguna lebih cenderung puas dengan SIPD ketika mereka memperoleh informasi berkualitas tinggi dan sistem mudah digunakan. Temuan ini sejalan dengan temuan Hasbah, Purwanto, dan Rulinawaty (2025), yang menemukan bahwa pengguna yang kompeten, sistem berkualitas tinggi, dan informasi yang akurat semuanya berperan dalam membuat implementasi sistem e-government lebih memuaskan bagi pengguna.

Analisis Kritis

Menurut penelitian, konsumen lebih cenderung merasa puas ketika mereka melihat manfaat nyata yang membantu mereka melakukan tugas sehari-hari, daripada ketika mereka hanya mengandalkan digitalisasi operasi administratif. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara kesiapan sumber daya manusia dan kualitas teknologi sangat penting untuk keberhasilan penerapan SIPD. Pada intinya, agar sistem dapat menuai manfaat penuhnya, investasi dalam pengembangan aplikasi tidak boleh kalah dibandingkan dengan investasi dalam peningkatan kompetensi perangkat. Hasil ini mendukung klaim yang dibuat oleh DeLone dan McLean (2003) bahwa interaksi antara kualitas sistem, kualitas informasi, dan pengalaman pengguna saat menggunakan sistem informasi adalah hal yang pada akhirnya mengarah pada kebahagiaan pengguna.

d. Manfaat Bersih (*Net Benefit*)

Setelah sistem informasi diterapkan, baik perusahaan maupun penggunanya pada akhirnya akan menuai manfaat, yang diuraikan oleh dimensi manfaat bersih. Sebuah model untuk sistem informasi yang sukses dikembangkan oleh DeLone dan McLean (2003), dimensi ini menjadi indikator utama yang menunjukkan kontribusi sistem terhadap peningkatan kinerja organisasi, baik dari aspek teknis maupun efektivitas administrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD di Kecamatan Parang memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi dan keterpaduan administrasi pemerintahan. Integrasi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dalam satu sistem menjadikan pengelolaan data lebih sederhana, terkoordinasi, dan efektif dibandingkan penggunaan beberapa aplikasi terpisah sebelumnya.

Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya efisiensi kerja aparatur, ditandai dengan berkurangnya penginputan data berulang serta lebih cepatnya penyelesaian pekerjaan. Selain itu, seluruh data yang tersimpan secara digital mempermudah proses pencarian dan akses dokumen sesuai kewenangan pengguna. Dengan demikian, SIPD berkontribusi dalam menyederhanakan proses administrasi sekaligus meningkatkan produktivitas aparatur.

Peningkatan efisiensi administrasi, produktivitas aparatur, dan kemudahan dalam mengelola informasi menunjukkan bahwa implementasi SIPD telah memberikan nilai tambah bagi organisasi. Keberhasilan suatu sistem informasi tidak hanya tercermin dari kemampuan teknologi yang digunakan, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan terhadap peningkatan kinerja organisasi serta kualitas layanan yang diberikan. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Turban, Pollard, dan Wood (2018) yang menegaskan bahwa sistem informasi yang berhasil mampu meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, dan kualitas pelayanan organisasi.

Peningkatan efisiensi administrasi dan produktivitas aparatur menunjukkan bahwa implementasi SIPD memberikan manfaat nyata bagi organisasi, terutama dalam mempercepat proses kerja dan mendukung pengelolaan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Kesimpulan ini disetujui oleh Rahmatullah dkk. (2025), yang berpendapat bahwa perkembangan manfaat bersih dalam implementasi sistem elektronik berbasis pemerintah dipengaruhi oleh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kepuasan pengguna.

Selain meningkatkan efisiensi, SIPD juga memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui dokumentasi administrasi yang terintegrasi. Kondisi ini memudahkan proses pengawasan, evaluasi, penyusunan laporan, serta mengurangi risiko kehilangan dokumen, dengan demikian mendukung pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa manfaat SIPD dirasakan dalam peningkatan koordinasi antarpegawai. Karena seluruh unit kerja mengakses data dari sistem yang sama, proses komunikasi menjadi lebih efektif dan perbedaan informasi antarbagian dapat diminimalkan. Keceragaman data tersebut membantu aparatur dalam menyusun dokumen administrasi secara lebih konsisten sekaligus mengurangi potensi kesalahan akibat penggunaan data yang berbeda.

Meskipun implementasi SIPD telah memberikan manfaat bagi penyelenggaraan administrasi, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kendala teknis sistem dan belum meratanya kompetensi aparatur. Akibatnya, pemanfaatan SIPD belum dapat berlangsung secara optimal di seluruh unit kerja.

Interaksi antara kualitas sistem, kualitas informasi, dan kepuasan pengguna menghasilkan keuntungan yang diraih oleh Distrik Parang, menurut Model Keberhasilan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003). Efektivitas administrasi, produktivitas pekerja, dan standar pengawasan pemerintah semuanya meningkat dengan menggabungkan ketiga faktor ini. Oleh karena itu, keuntungan bersih menunjukkan bahwa SIPD secara umum berhasil.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Septiani dan Isnawaty (2024), yang menemukan bahwa efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui penggunaan SIPD dengan mengintegrasikan proses kerja dan menerapkan manajemen data yang lebih sistematis. Ketika didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai dan persiapan sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah dapat meningkatkan tata kelola organisasi, menurut penelitian Damayanti dan Tukiman (2025). Akan tetapi, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih spesifik dengan menunjukkan bahwa pada tingkat kecamatan, manfaat SIPD tidak hanya tercermin dari peningkatan efisiensi administrasi, tetapi juga dari meningkatnya koordinasi antarpegawai serta kemudahan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, dimensi *net benefit* menunjukkan bahwa penerapan SIPD di Kecamatan Parang telah memberikan dampak positif terhadap efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Meskipun masih terdapat kendala teknis dan keterbatasan kompetensi aparatur, manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan hambatan yang dihadapi. Oleh karena itu, implementasi SIPD dapat dikatakan efektif, Meskipun demikian, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal membangun kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan infrastruktur teknologi, dan terus menyempurnakan sistem untuk memastikan bahwa semua pengguna merasakan manfaatnya secara maksimal.

e. Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan keempat dimensi yang dianalisis menggunakan Model Keberhasilan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003), penerapan SIPD di Kecamatan Parang dapat dinilai efektif, meskipun efektivitas tersebut belum mencapai kondisi optimal. Kualitas sistem yang cukup baik telah mendukung integrasi proses administrasi, sedangkan kualitas informasi menghasilkan data yang lebih akurat dan konsisten. Kedua aspek tersebut mendorong meningkatnya kepuasan aparatur dalam

menggunakan SIPD serta menghasilkan manfaat nyata berupa peningkatan efisiensi kerja, produktivitas aparatur, koordinasi antarbagian, dan akuntabilitas administrasi.

Di sisi lain, studi ini menunjukkan bahwa kualitas aplikasi bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan implementasi SIPD. Keterampilan sumber daya manusia dan aspek organisasi lainnya sangat penting, intensitas pelatihan, kesiapan menghadapi perubahan sistem, serta dukungan infrastruktur teknologi, memiliki pengaruh yang sama pentingnya terhadap efektivitas implementasi. Dengan demikian, transformasi digital pemerintahan perlu dipandang sebagai proses perubahan organisasi secara menyeluruh, bukan sekadar penerapan teknologi informasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SIPD dipengaruhi oleh keterkaitan antara kualitas teknologi, kesiapan organisasi, dan kompetensi aparatur. Kualitas teknologi tercermin dari kemampuan sistem dalam menyediakan fitur yang terintegrasi, kemudahan akses, serta dukungan terhadap proses administrasi pemerintahan. Sementara itu, kesiapan organisasi mencakup dukungan kelembagaan, koordinasi antarunit kerja, serta ketersediaan sumber daya yang mendukung operasional sistem. Dalam menjalankan tugas-tugas administratif rutin, efisiensi sistem sangat bergantung pada keterampilan pegawai negeri.

Baik perusahaan maupun penggunaannya memperoleh manfaat dari interaksi ketiga faktor ini. Oleh karena itu, teknologi saja tidak akan menjamin keberhasilan implementasi SIPD; sumber daya manusia yang kompeten dan tata kelola organisasi yang dapat menyesuaikan diri dengan metode kerja digital baru juga diperlukan.

Hasil ini juga menunjukkan bahwa strategi jangka panjang diperlukan agar SIPD dapat bekerja lebih baik. Untuk menjamin pengoperasian sistem yang stabil dan ideal, perlu dilakukan hal-hal seperti membuat dan memperbarui sistem, meningkatkan kompetensi pegawai negeri melalui pelatihan berkelanjutan, menawarkan bantuan teknis yang terorganisir, dan memperkuat infrastruktur teknologi. Untuk pemerintahan yang lebih baik, lebih terbuka, dan lebih bertanggung jawab, harus ada kerja sama antara sumber daya teknologi, modal manusia, dan faktor kelembagaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Dengan menggunakan Model Keberhasilan Sistem Informasi DeLone dan McLean—yang mencakup kualitas sistem, kualitas informasi, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih—instalasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, dievaluasi efektivitasnya. Berdasarkan temuan studi, implementasi SIPD telah sangat sukses dan telah meningkatkan administrasi pemerintahan.

Dengan mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, administrasi, dan pelaporan secara sistematis ke dalam satu platform, SIPD meningkatkan efisiensi administrasi dari sudut pandang kualitas sistem. Dalam hal kualitas informasi, sistem ini membantu pengambilan keputusan dengan menghasilkan data yang akurat, konsisten, dan mudah diakses. Bersamaan dengan itu, kemudahan penggunaan sistem mencerminkan kepuasan pengguna, yang pada gilirannya mempercepat penyelesaian pekerjaan, meningkatkan kerja sama, dan mendukung administrasi yang terorganisir. Secara keseluruhan, pengenalan SIPD telah bermanfaat karena telah meningkatkan akuntabilitas administrasi pemerintahan, kolaborasi antar departemen, produktivitas staf, dan efisiensi kerja.

Meskipun demikian, masih ada sejumlah tantangan dalam implementasi SIPD, termasuk gangguan teknologi, perubahan sistem yang memerlukan modifikasi, dan variasi keahlian staf dalam menjalankan program. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas teknis hanyalah salah satu faktor di antara beberapa faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi SIPD. Persiapan organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan dukungan institusional juga berperan.

Kualitas sistem, kualitas informasi, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih adalah variabel yang saling terkait yang menentukan keberhasilan implementasi sistem informasi. Model Keberhasilan Sistem Informasi DeLone dan McLean, yang didukung oleh kesimpulan penelitian ini, menempatkan faktor-faktor ini sebagai faktor keberhasilan kritis. Penerapan temuan penelitian secara praktis dapat membantu Pemerintah Kabupaten Magetan mengevaluasi seberapa baik mereka telah memperkuat kapasitas aparat, meningkatkan keandalan sistem, dan memberikan dukungan teknis berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas implementasi SIPD.

Pelayanan publik yang lebih baik, pemerintahan yang lebih terbuka, dan akuntabilitas yang lebih besar di tingkat administrasi adalah semua hasil dari transformasi digital pemerintah, menurut temuan tersebut. Hasil ini sejalan dengan tujuan pengembangan pemerintahan digital, yang menekankan penggunaan TI untuk meningkatkan layanan publik dan efisiensi organisasi (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2022).

Karena penelitian ini bersifat kualitatif dan hanya diterapkan pada satu sub-distrik, hasilnya tidak dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas. Untuk memahami lebih baik seberapa efektif implementasi SIPD, penelitian tambahan harus mengintegrasikan metode kualitatif dan kuantitatif, memperluas lokasi penelitian, dan sebagainya.

SARAN

Temuan studi ini memberikan sejumlah rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan SIPD di Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Pertama, Pemerintah Kabupaten Magetan melalui instansi terkait perlu meningkatkan kompetensi aparatur secara berkelanjutan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan yang disesuaikan dengan perkembangan fitur serta pembaruan sistem SIPD. Langkah tersebut penting untuk meningkatkan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem secara mandiri dan meminimalkan ketergantungan terhadap operator.

Kedua, perlu dilakukan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi, terutama terkait stabilitas jaringan internet dan keandalan sistem, agar gangguan teknis yang berpotensi menghambat proses administrasi dapat diminimalkan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pengelola SIPD di tingkat pusat perlu terus diperkuat sehingga setiap pembaruan sistem dapat disosialisasikan secara cepat dan disertai dengan petunjuk teknis yang mudah dipahami oleh pengguna.

Saran ketiga bagi para peneliti di masa mendatang adalah untuk menyertakan lebih banyak kecamatan atau organisasi pemerintah daerah dalam penelitian mereka guna mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang seberapa efektif implementasi SIPD. Untuk memberikan rekomendasi yang lebih menyeluruh bagi kemajuan tata kelola berbasis digital dan untuk mengukur efisiensi implementasi SIPD secara lebih objektif, studi di masa mendatang dapat menggabungkan metodologi kualitatif dan kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). *Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable*. *Information Systems Research*, 3(1), 60–95.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). *The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update*. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30.
- Hasbah et al. (2025) tentang kepuasan pengguna e-government.
- Heeks, R. (2006). *Implementing and Managing e-Government: An International Text*. Sage Publications.
- Indrajit, R. E. (2006). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Andi.
- Jogiyanto, H. M. (2007). *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Andi.

- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (17th ed.). Pearson.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Rahmatullah et al. (2025) tentang keberhasilan e-government menggunakan model DeLone & McLean.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance*. Mandar Maju.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Turban, E., Pollard, C., & Wood, G. (2018). *Information Technology for Management: On-Demand Strategies for Performance, Growth and Sustainability* (11th ed.). Wiley.
- United Nations. (2022). *United Nations E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government*. United Nations.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Sage Publications.